


Terbit online pada laman web jurnal : <http://e-journal.sastra-unes.com/index.php/JIPS>

 Fakultas Sastra Universitas Ekasakti	JURNAL JIPS (Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic)	
	Vol.5No.1 ISSN : 2579-5449 (media cetak)	E-ISSN : 2597-6540 (media online)

PENGARUH JUMLAH PENDUDUK DAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA 19 KABUPATEN DAN KOTA DI SUMATERA BARAT TAHUN 2015-2019

Gerry Hamdani Putra, Evinda Rosliani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi KBP

gerry.hamdaniputra@gmail.com, evindarosliani12@gmail.com

Abstrak

Regional tax is an obligatory contribution to the region owed by an individual or entity that is compelling based on law without receiving direct compensation and is used for regional needs for the greatest prosperity of the people. This study aims to examine the Total Population and Gross Regional Domestic Product of Regional Tax Revenues in 19 districts and cities in west sumatera. This study uses local government revenue realization data in 19 districts and cities of west sumatera for the 2015-2019 period published by the Central Statistik Agency (BPS). Hypothesis testing uses panel data regression using the eviews 8.0 program. The results showed that population has a negative and significant effect on local tax revenue and gross regional domestic product has a positive and significant effect on local tax revenue.

Kata Kunci: Total Population, Gross Regional Domestic Product

© 2021Jurnal JIPS

I INTRODUCTION

Indonesia memiliki potensi perekonomian yang berbeda-beda pada setiap daerahnya, untuk menghadapi situasi tersebut sehingga dilakukan upaya untuk pembangunan yang lebih merata di setiap daerah. Pelaksanaan pembangunan ini tidak terlepas dari adanya pembangunan daerah yang menjadi bagian terpenting dari pembangunan nasional, sehingga setiap daerah diharapkan agar dapat mengetahui segala potensi yang dapat menjadi kebutuhan daerahnya. (Riemannian, 2015)

Otonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu Otonomous yang berarti pengaturan sendiri dan pemerintahan sendiri. Pengertian otonomi menyangkut 2 hal pokok yaitu kewenangan untuk membuat hukum sendiri (*own laws*) dan kebebasan untuk mengatur pemerintahan sendiri (*self government*). Berdasarkan pengertian diatas maka otonomi daerah pada hakekatnya adalah

hak atau wewenang untuk mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom. (Mongdong et al., 2018)

Penerimaan negara digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional, penerimaan ini secara tidak langsung akan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Salah satu sumber penerimaan negara adalah pajak, menurut (Sania et al., 2018) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (*kontraprestasi*) yang langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Secara umum pajak ialah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan Undang-Undang yang bersifat memaksa dan terutang oleh yang wajib pajak,

pembayaran tidak mendapat prestasi kembali (kontraprestasi/balas jasa) secara langsung. Sedangkan pajak daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah menjadi salah satu sumber pendapatan yang cukup potensial bagi 19 Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat. Pada era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal seperti sekarang ini, fungsi dan peranan pajak sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah terasa sangat penting dalam perencanaan maupun pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah. (Usman, 2017)

Faktanya yang terjadi pada saat sekarang ini mengenai wabah virus corona yang mengubah peta perekonomian global di tahun 2020 ini, termasuk Indonesia. Salah satu dampaknya yaitu penerimaan negara terutama yang berasal dari pajak diperkirakan tidak akan sesuai dengan harapan. Sejumlah langkah stimulis fiskal yang bakal dikeluarkan pemerintah demi menangkai perlambatan ekonomi akibat virus covid-19 juga menambah beban. Dalam APBN 2020, pemerintah menargetkan penerimaan pajak mencapai Rp 1.680 triliun. Untuk mencapai target tersebut dibutuhkan kenaikan penerimaan pajak mencapai 23,3% dari realisasi 2019 yang hanya sebesar Rp 1.332,1 triliun. Situasi saat ini sangat tidak menguntungkan, sehingga pemerintah perlu mengantisipasinya dengan merevisi target penerimaan pajak daerah serta proyeksi pertumbuhan ekonomi dan asumsi makro lainnya. Angka pertumbuhan ini sepertinya sulit tercapai terlebih jika kita melihat kinerja perekonomian Indonesia dan global selama awal 2020 yang terganggu karena adanya virus covid-19 yang terus meningkat.

Pada penelitian sebelumnya (Rudzali et al., 2019) Jumlah penduduk akan mempengaruhi perkembangan penerimaan dari suatu pajak daerah yang berpengaruh secara signifikan, jika dalam suatu daerah bertambah suatu jumlah penduduk maka dapat meningkatkan potensi jumlah wajib pajak, sehingga penerimaan pajak

juga dapat meningkat dan akan berdampak langsung terhadap penerimaan pajak daerah.

Dan penelitian (Mispiyanti & Kristanti, 2015) Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif dan signifikan jika semakin tinggi PDRB maka pajak dari suatu daerah juga mengalami peningkatan serta penerimaan PAD juga akan ikut meningkat.

Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Menurut (Rudzali et al., 2019) mengatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah artinya jumlah penduduk akan dapat meningkatkan pajak dari suatu daerah jika dalam setiap daerah memiliki penduduk dengan angka tertinggi dan apabila dalam suatu daerah mengalami penurunan maka penerimaan pajak daerah akan mengalami penurunan.

Menurut (Lumy et al., 2018) mengatakan bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk. Artinya meningkatnya jumlah penduduk akan meningkatkan kegiatan produksi dan konsumsi dalam masyarakat menyebabkan perekonomian akan berkembang kearah yang lebih baik dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Menurut (Sania et al., 2018) mengatakan Jumlah Penduduk, memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Artinya jumlah penduduk dapat mempengaruhi besarnya setiap penerimaan pajak dari suatu daerah. karena jika semakin banyak jumlah penduduk sehingga berpotensi akan bertambahnya jumlah wajib pajak, serta akan banyak penerimaan pajak daerah yang diperoleh dan juga diterima.

Menurut (Sari & Ilyas, 2019) mengatakan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah.

H_1 : Jumlah Penduduk Berpengaruh Positif Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Produk Domestik Regional Bruto menjadi salah satu faktor penting dalam kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah, perekonomian yang tumbuh dan berkembang akan dapat dilihat dari meningkatnya pendapatan masyarakat di daerah tersebut.

Menurut (Mispiyanti & Kristanti, 2015) pada output regresi menunjukkan bahwa produk

domestik regional bruto berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah. Artinya semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka akan tinggi pula pendapatan seseorang.

Menurut (Latifa, 2015) mengatakan produk domestik regional bruto (PDRB) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Karena PDRB merupakan cerminan perkembangan ekonomi di suatu daerah. Semakin meningkat PDRB menggambarkan bahwa perkembangan ekonomi semakin baik serta kemampuan masyarakat dalam membayar pajak daerah juga akan semakin meningkat.

Menurut (Lumy et al., 2018) mengatakan produk domestik regional bruto (PDRB) berpengaruh positif dan terhadap penerimaan pajak daerah. Artinya apabila PDRB mengalami kenaikan akan diikuti dengan kenaikan penerimaan pajak daerah. Ketika terjadi penambahan PDRB maka dapat disimpulkan semakin tinggi nilai PDRB suatu daerah maka semakin besar pula potensi pajak daerah tersebut

Menurut (Rudzali et al., 2019) mengatakan produk domestik regional bruto (PDRB) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

H₂ : Produk Domestik Regional Bruto Berpengaruh Positif Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

II RESEARCH METHOD

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif ialah suatu cara atau metode penelitian yang berpedoman pada filsafat positivisme, biasanya dipergunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data dengan menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, yang bertujuan untuk menguji hipotesis yg telah ditentukan (Sugiyono, 2017).

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang penulis gunakan dalam Penelitian ini adalah menggunakan data panel. Analisis data Panel yaitu analisis yang menggunakan data kombinasi data *time series* dan *cross section* yaitu data yang terdiri dari beberapa unit objek dalam beberapa periode waktu. Sedangkan skala pengukuran

menggunakan skala rasio. Data yang dipakai pada penelitian ini ialah data sekunder. Yaitu data yang berasal dari catatan yang ada di dalam suatu perusahaan serta terkait dengan sumber lainnya, dengan mengadakan studi kepustakaan maka dapat dengan mudah untuk mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan objek penelitian dan juga dapat dilakukan dengan menggunakan data yang berasal dari Biro Pusat Statistik (BPS). Dan skala yang diterapkan dalam penelitian ini ialah skala Rasio.

3. Populasi dan Sampel

Populasi yaitu wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dari penelitian yang diambil ialah 19 Kabupaten dan Kota Di Sumatera Barat.(Sugiyono, 2017).

Daftar Pemerintah 19 kabupaten dan Kota Di Sumatera Barat
Tabel 1

o	Nama Kabupaten atau Kota	o	Nama Kabupaten atau Kota
	Kab. Lima puluh Kota	1	Kota Padang Panjang
	Kab. Agam	2	Kota Padang
	Kab. kepulauan Mentawai	3	Kota Payakumbuh
	Kab. Padang Pariaman	4	Kota Sawahlunto
	Kab. Pasaman	5	Kota Solok
	Kab. Pesisir Selatan	6	Kota Pariaman
	Kab. Sijunjung	7	Kab. Pasaman Barat
	Kab. Solok	8	Kab. Dhamasraya
	Kab. Tanah Datar	9	Kab Solok Selatan
0	Kota. Bukit Tinggi		

Daftar Pemerintah 19 kabupaten dan Kota Di Sumatera Barat

Sumber : www.djpk.depkeu.go.id

4. Definisi Operasional Variabel

Operasional variabel merupakan petunjuk yang menjelaskan tentang bagaimana mengukur variabel secara nyata dan konkret kepada peneliti agar peneliti lebih mudah untuk menentukan

metode pengukuran sebuah variabel serta menentukan indikator yang lebih nyata atau konkret agar lebih mudah mengukurnya dan mengujinya secara empiris.

Tabel 2
Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Pengertian	Pengukuran	Sumber
1	Penerimaan Pajak Daerah (Y)	Penerimaan pajak adalah penerimaan yang berasal atau bersumber dari angsuran pajak dalam tahun berjalan yang telah dibayar oleh wajib pajak dan dilaksanakan setiap bulannya.	Penerimaan Pajak Daerah di hitung dari jumlah keseluruhan penerimaan yang diterima oleh suatu daerah yang bersumber dari pajak daerah, yang diukur dalam satuan rupiah pertahun.	(Lumy et al., 2018)
2.	Jumlah Penduduk (X1)	Jumlah penduduk adalah suatu sekelompok orang yang telah tinggal atau menempati suatu wilayah	Jumlah penduduk di hitung dari banyaknya penduduk yang tinggal/	(Lumy et al., 2018)

		tertentu. Jumlah penduduk sangat mempengaruhi besar kecilnya penerimaan pajak pada suatu daerah,	menetap di suatu daerah/ wilayah tertentu, yang diukur dalam satuan jiwa pertahun	
3.	Produk Domestik Regional Bruto (X2)	PDRB adalah nilai tambah barang atau jasa yang dapat diperoleh dalam suatu wilayah atau daerah dalam tahun tertentu, semakin besar PDRB maka pertumbuhan ekonomi suatu daerah semakin tinggi. PDRB memiliki peran penting dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah karena pertambahan nilai dari produk tersebut adalah pajak tidak langsung yang masuk terhadap penerimaan pajak daerah.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di hitung dari keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi disuatu wilayah tertentu, dalam kurun waktu satu tahun atas dasar harga yang berlaku, dan diukur dalam satuan jutaan rupiah pertahun.	(Lumy et al., 2018)

5. Teknik Analisis Data

Uji Model Kelayakan Data Panel

Uji Model Data Panel

Common Effect Model

Common Effect Model (Pooled Least Squares/PLS) adalah pendekatan dengan *intercept* maupun *slope* dari model sama sehingga tidak terlihat perbedaan antara individu dan perbedaan waktu. Hasil analisis regresi diasumsikan berlaku untuk semua objek pada semua waktu (Hadya et al., 2017)

Fixed Effect Model

Efek tetap (*Fixed Effect Model/FEM*) adalah suatu pendekatan yang bisa memperlihatkan perbedaan antar objek meskipun dengan koefisien regresor yang sama. Menurut (Hadya et al., 2017) efek tetap adalah bahwa satu objek, memiliki konstanta tetap besarnya untuk berbagai periode waktu dan memiliki koefisien regresi yang besarnya sama setiap waktu.

Random Effect Model

Random Effect Model (REM) menggunakan residual yang diduga memiliki hubungan untuk setiap waktu dan objek. Dalam REM, parameter-parameter yang berbeda antara wilayah ataupun antar waktu dimasukkan ke dalam *error*. Model ini diketahui sebagai model efek acak yang

sering disebut *error component model*. Jika kita menggunakan model ini, kita bisa menghemat penggunaan derajat kebebasan serta tidak mengurangi jumlah seperti yang dikerjakan pada FEM. Ini melibatkan parameter yang merupakan hasil dari pencarian yang akan semakin efisien (Hadya et al., 2017)

Uji Lanjut

Uji Chow

Bertujuan untuk memilih model yang akan digunakan antara *common effect* dan *fixed effect*. Jika pada Cross-section Chi-square lebih kecil dari $\alpha < 0.05$, maka H_0 ditolak. Artinya model *Fixed Effect* lebih baik digunakan dari model *Common Effect* (Hadya et al., 2017).

Hipotesis dalam pengujian ini yaitu:

H_0 : model menggunakan pendekatan

Common effect model

H_1 : model menggunakan pendekatan *fixed effect model*

Uji Hausman

bertujuan untuk memilih antara *model fixed effect* dan *model random effect*. Jika pada Cross-section random lebih kecil dari $\alpha < 0.05$, sehingga H_0 ditolak. Dengan demikian, yang cocok digunakan dalam regresi data panel adalah *Fixed Effect Model* (Hadya et al., 2017).

Hipotesis dalam pengujian ini yaitu:

Ha : model menggunakan pendekatan *random effect model*

Ho : model menggunakan pendekatan *fixed effect model*

Uji hausman mengikuti distribusi Chi Square dengan *degree of freedom* sebanyak k, diman k adalah jumlah variabel independen. Jika nilai statistic Hausman lebih besar dari nilai kritisnya maka Ha ditolak dan model yang lebih tepat adalah *fixed effect model*, sedangkan sebaliknya bilai nilai statistik Hausman lebih kecil dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah model *random effect* (Hadya et al., 2017).

Jika probabilitas < 0,05 maka tolak Ha

Jikaprobabilitas > 0,05 maka terima H0

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen terdistribusi normal atau tidak. Pengujian dilakukan dengan menggunakan *Jarque-Bera Test*. Untuk mengetahui normal atau tidaknya residual secara sederhana yaitu dengan membandingkan nilai probabilitas JB (*Jarque-Bera*) hitung dengan tingkat alpha 0,05 (5%). Apabila *Prob. JB* hitung besar dari 0,05 maka residual terdistribusi normal dan apabila kecil dari 0,05 maka residual terdistribusi tidak normal. (Hadya et al., 2017)

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinieritas adalah untuk melihat ada atau tidak adanya hubungan antar variabel bebas. Dalam memperkirakan ada atau tidak adanya mutikolinieritas bisa diketahui dari nilai r nya, apabila $r < 0,8$ maka tidak terdapat hubungan antar variabel bebas dan apabila $r > 0,8$ maka terdapat korelasi antar variabel bebas. Selain itu untuk mengetahui adanya multikolinieritas dengan cara melihat nilai tolerance dan VIF. (Hadya et al., 2017)

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji Heteroskedastisitas menggunakan uji *Glejser* yaitu dengan cara meregresi nilai *absolute* residual dari model yang di estimasi pada variabel X. Apabila nilai

signifikansinya diatas 0,05 dan tidak ada satupun variabel bebas yang berpengaruh signifikan terhadap nilai *absolute* residual, maka model tidak terjadi heteroskedastisitas. (Hadya et al., 2017)

Analisis Regresi Data Panel

Penelitian ini dilakukan agar dapat diketahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis regresi data panel di uji agar diketahui apakah hipotesis yang telah dibuat akan diterima atau ditolak. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5%. Model statistik yang diestimasi merupakan model yang terbaik dan terbebas dari penyimpangan asumsi klasik (Hadya et al., 2017).

Adapun persamaan regresi yang digunakan dalam pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

$$\text{Log Y} = \beta_0 + \beta_1 \log X_{1it} + \beta_2 \log X_{2it} + \mu_{it}$$

Keterangan:

LogY = Penerimaan Pajak Daerah

β_0 = Konstanta

β_1 = Koefisien Regresi Jumlah Penduduk

β_2 = Koefisien Regresi PDRB

$\log X_{1it}$ = Jumlah Penduduk

$\log X_{2it}$ = Produk Domestik Regional

Bruto

μ_{it} = Variabel Pengganggu

i = Unit Cross Section

t = Periode Waktu

Uji Hipotesis

Uji T-test

Menurut Mansari (2016) Uji t-test digunakan untuk menguji konstanta yang di duga untuk mengestimasi persamaan dapat menjelaskan pengaruh fariabel bebas terhadap variabel terikat. Dasar pengambilan keputusan digunakan dalam uji t adalah sebagai berikut:

e. Jika nilai probabilitas signifikansi > 0,05, maka hipotesis ditolak. Hipotesis ditolak mempunyai arti bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

f. Jika nilai probabilitas signifikansi < 0,05, maka hipotesis diterima. Hipotesis tidak dapat ditolak mempunyai arti bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi di intinya mengukur seberapa jauh kemampuan bentuk dalam mempengaruhi variasi variabel Y atau

kontribusi dari variabel bebas untuk variasi dari variabel terikat. Nilai koef. determinan ialah diantara 0 dengan 1. Nilai R² tersebut yang berkontribusi lemah yaitu antara 0 – 0.5 (50 persen) dan jika semakin mendekati 1 (100

persen) berarti kontribusi variabel bebas makin kuat. Mansuri (2016) mengemukakan bahwa apabila dalam uji empiris didapat angka adjusted R² negatif, berarti angka adjusted R² sama serta bernilai nol.

Uji Hipotesis

Analisis Regresi Model Regresi Data Panel (REM)

Tabel 3
Random Effect Model

Dependent Variable: LOGPD
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 03/23/21 Time: 19:03
Sample: 2015 2019
Periods included: 5
Cross-sections included: 19
Total panel (balanced) observations: 95
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
	-	0.1720	-	0.00
LOGJP	1.047106	.25	6.086922	.00
	2.249	0.1602	14.040	0.00
LOGPDRB	.545	.21	2.8	.00
	-	1.4043	-	0.00
C	6.335658	.46	4.511467	.00

Sumber: Data Sekunder yang diolah dengan E-Views 8

Pada tabel 3 maka dapat dirumuskan persamaan regresi linear berganda:

$$Y_{it} = -6.335658 + (-1.047106) X_{1ij} + 2.24954 X_{2ij} + \text{eror}$$

Berdasarkan model persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Hasil uji analisis regresi berganda terlihat bahwa nilai konstanta sebesar -6.335658 dengan arti bahwa tanpa adanya pengaruh dari variabel bebas yaitu Jumlah Penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto maka Penerimaan Pajak Daerah akan bernilai -6.335658.

2. Koefisien X₁ atau Jumlah Penduduk di peroleh sebesar -1.047106 hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan variabel Jumlah Penduduk sebanyak 1 satuan rupiah berarti akan menurunkan variabel jumlah penduduk sebanyak -1.047106 dengan anggapan variabel lain dalam bentuk konstan.

3. Koefisien X₂ atau PDRB di peroleh sebesar 2.249545 hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan variabel Produk Domestik Regional Bruto sebanyak 1 satuan rupiah berarti akan meningkatkan variabel Produk domestik regional bruto sebanyak 2.249545 dengan asumsi variabel lain konstan.

Pengujian Hipotesis

Tabel 3
Hasil Uji T

bel	Varia fisien	Koe	t- statistik	t- tabel	P rob	A lpha	A pulan	Kesim
P	LOGJ	-	-	1.9	0	.05	0	H1
		1.047106	6.086922	84723	.0000			Diterima
PDRB	LOG	2.24	14.	1.9	0	.05	0	H2
		9545	04028	84723	.0000			Diterima

Sesuai dengan hasil pengujian hipotesis pertama dengan menggunakan variabel Jumlah Penduduk diperoleh probability sebesar 0,0000. Di dalam pegujian digunakan tingkat kesalahan sebesar 0,05. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai Prob. Sebesar $0,0000 < 0,05$ maka keputusannya H1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah pada 19 Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat.

Sesuai dengan hasil pengujian hipotesis kedua dengan menggunakan variabel PDRB diperoleh nilai Prob. Sebesar 0,0000. Di dalam pengujian digunakan tingkat kesalahan sebesar 0,05. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai Prob. Sebesar $0,0000 < 0,05$ maka keputusannya H2 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah pada 19 Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat.

Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R-Square*)

Tabel 4

Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R-Square*)

Keterangan	Koefisien
<i>R-Square</i>	0.972447
<i>Adjust R-Square</i>	0.965000

Adjusted R-squared sebesar 0.965000% menjelaskan bahwa kemampuan variasi nilai panel menjelaskan variasi Pajak Daerah sebesar 96,5% sedangkan sisanya 3,5% ($100\% - 96,5\%$)

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model atau dijelaskan oleh indikator lain di luar penelitian ini.

III RESULTS AND DISCUSSION

Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh setelah dilaksanakan pengujian 95 data observasi yang merupakan data yang diambil dari situs Badan Pusat Statistik Daerah di Kota Padang bisa disimpulkan bahwa Hipotesis 1 yang dikemukakan dalam penelitian ini yaitu bahwa diduga Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah. Berdasarkan hasil uji nilai t hitung untuk variabel Jumlah Penduduk membuktikan bahwa H1 diterima artinya ada pengaruh signifikan antara Jumlah Penduduk terhadap Pajak Daerah.

Hasil penelitian didapat bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah pada 19 Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat. Hal ini berarti peningkatan jumlah penduduk pada 19 Kabupaten dan Kota Sumatera Barat diikuti dengan penurunan penerimaan pajak daerah yaitu apabila jumlah penduduk meningkat sebesar satu satuan maka penerimaan pajak daerah akan menurun sebesar -1.047106 satuan dengan asumsi *ceteris paribus*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penilitian (Sari & Ilyas, 2019) bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh positif atau

berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak daerah.

Hasil penelitian (Lumy et al., 2018) menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi Sulawesi Utara. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Saputra, 2018) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Cilegon.

Hasil penelitian (Latifa, 2015) menunjukkan bahwa jumlah penduduk mempunyai elastisitas positif terhadap penerimaan pajak daerah karena syarat untuk memungut pajak diantaranya adalah harus adanya subjek pajak. Dengan naiknya jumlah penduduk, maka akan semakin banyak penduduk yang menikmati jasa pelayanan yang diberikan pemerintah yang bersumber dari pajak daerah.

Jumlah penduduk adalah salah satu asset disuatu daerah, karena jumlah penduduk yang banyak diharapkan akan meningkatkan pula dengan peningkatan pendapatan daerah. Menurut Michael T.Sadler dan Thomas Doubleday mengemukakan bahwa daya reproduksi manusia dibatasi oleh jumlah penduduk atau populasi yang berada di suatu daerah tersebut, jika penduduk disuatu daerah padat atau banyak maka akan menyebabkan daya reproduksi manusia akan menurun dan begitupun sebaliknya jika jumlah penduduk kurang padat maka daya produksi akan meningkat pula.

Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka didapatkan hasil bahwa PDRB Perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini berarti menunjukkan arti apabila PDRB Perkapita meningkat sebesar satu satuan maka akan meningkatkan sebesar 2.249545 satuan dengan asumsi *ceteris paribus*. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa semakin besar PDRB berarti pertumbuhan ekonomi suatu daerah semakin tinggi.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Lumy et al., 2018) yang menyatakan bahwa variabel PDRB berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Berarti bahwa PDRB yang merupakan indikator untuk mengukur tingkat perekonomian suatu daerah

berperan dalam penerimaan pajak daerah. Sektor-sektor pembentuk PDRB juga telah dikenakan pajak yang sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, sektor-sektor tersebut dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah. Hal ini sama dengan penelitian yang dilakukan (Nurrohman, 2010) yang mengatakan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Teori mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat PDRB berarti bahwa semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. dan bila pertumbuhan ekonomi meningkat maka semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakat dan akan semakin tinggi pula kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah.

Hasil penelitian yang dilakukan (Sari & Ilyas, 2019) Dalam penelitian tersebut diketahui bahwa PDRB mempunyai elastisitas yang positif terhadap pajak daerah. Meningkatnya PDRB menunjukkan adanya peningkatan dalam perekonomian pada daerah tersebut. Meningkatnya perekonomian suatu daerah, maka akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Hasil Penelitian (Putra & Anis, 2018) dalam penelitian tersebut diketahui bahwa PDRB mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat. Dapat disimpulkan bahwa semakin besarnya PDRB Perkapita disuatu daerah maka akan semakin besar pula pendapatan daerah terutama pada penerimaan pajak daerah tersebut.

Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Domestik Regional Bruto Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh setelah dilaksanakan pengujian terhadap 95 data observasi yang merupakan data yang diambil melalui website <http://sumbar.bps.go.id> bisa disimpulkan bahwa Hipotesis 3 yang dikemukakan dalam penelitian ini yaitu bahwa diduga Jumlah Penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah artinya ada pengaruh yang signifikan antara variabel Jumlah Penduduk dan PDRB terhadap Penerimaan Pajak Daerah. Hal ini menjelaskan bahwa tingkat Jumlah Penduduk dan PDRB berpengaruh pada Penerimaan Pajak Daerah dimana jika variabel Jumlah Penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto meningkat

berarti juga akan meningkatkan variabel Penerimaan Pajak Daerah

Hasil ini juga diperkuat dengan penelitian terdahulu (Sania et al., 2018) yang menyebutkan bahwa Jumlah Penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah jika diuji secara bersama-sama atau simultan. Hal ini dapat menambah Penerimaan Pajak Daerah

karena semakin tinggi jumlah penduduk dan PDRB maka akan menambah penerimaan pajak daerah dan pendapatan daerah. Penelitian (Miftahol et al., 2018) menunjukkan bahwa Jumlah Penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif dan signifikan jika diuji secara bersama-sama atau simultan.

IV CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan penelitian sebagai berikut : (1) Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah pada 19 Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat. (2) Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah pada 19 Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia, sehingga peneliti akhirnya dapat menyelesaikan jurnal ini tepat waktu. Peneliti mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ketua STIE “KBP” Ibu Aminar Sutra Dewi, SE, M.Si dan Bapak Gerry Hamdani Putra, SE, M.Si selaku dosen pembimbing peneliti yang telah membimbing dengan memberikan yang terbaik untuk kelancaran skripsi peneliti. Terimakasih atas waktu dan masukan yang sangat bermanfaat.

Bibliography

- [1]Ghozali, P. D. H. ima. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 23. In P. P.Harto (Ed.), *IBM SPSS 23* (ke 8, p. 52). Undip.
- [2]Hadya, R., Begawati, N., & Yusra, I. (2017). *Analisis Efektivitas Pengendalian Biaya, Perputaran Modal, Kerja Dan Rentabilitas Ekonomi Menggunakan Regresi Data Panel*. 37(12), 1648–1653. <https://doi.org/10.3969/j.issn.1673-4254.2017.12.15>
- [3]Latifa, A. (2015). *Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB dan Belanja Daerah Terhadap Penerimaan Pajak Daerah*. 27. [http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/65672/Ainul Latifah-101810401034.pdf?sequence=1](http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/65672/Ainul%20Latifah-101810401034.pdf?sequence=1)
- [4]Lumy, D. G., Kindangen, P., Engka, D. S. M., Ratulangi, U. S., Penduduk, J., & Daerah, P. (2018). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan*. 19(6), 1–16.
- [5]Miftahol, A., Rofik, M., & Andrianingsih, V. (2018). *Pengaruh Jumlah Penduduk, Jumlah Industri dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Penerimaan Pajak Daerah*. 1(1), 175–182.
- [6]Mispiyanti, & Kristanti, I. N. (2015). Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Inflasi, Nilai Kurs dan Tenaga Kerja Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kabupaten Cilacap Banyumas dan Purbalingga. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- [7]Mongdong, C. M., Masinambow, V. A. J., & Tumangkeng, S. (2018). *Analisis Pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk, Dan Infrastruktur Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Tomohon*. 18(05), 198–209.
- [8]Nurrohman, A. (2010). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Surakarta (Tahun 1994-2007)*.
- [9]Putra, T. P., & Anis, A. (2018). *Pengaruh Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto Perkapita dan Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat*.
- [10]Riemannian. (2015). *Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Dan Jumlah Penduduk Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Daerah*. 105(3), 129–133. <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>
- [11]Rudzali, A., Verawati, & Mat Juri, H. (2019). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur*. 15(1), 82–94.
- [12]Sania, H., Yunita, E. A., & Muttaqin, I. (2018). Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 10(1), 74–86. <https://doi.org/10.24905/permana.v10i1.68>
- [13]Saputra, A. A. (2018). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Cilegon*.
- [14]Sari, D. P., & Ilyas, F. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Di Provinsi Bengkulu. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 75–85. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.6.1.75-85>
- [15]Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (ke-26). ALFABETA.
- [16]Usman, R. (2017). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Padang Setelah Dikeluarkannya Undang-Undang Otonomi Daerah. *JAF- Journal of Accounting and Finance*, 1(01), 87. <https://doi.org/10.25124/jaf.v1i01.902>